

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- Perkembangan inflasi daerah pada Triwulan I Tahun 2025

Selama Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025, kondisi inflasi di Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya tekanan kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan strategis. Berdasarkan hasil pemantauan Indeks Perubahan Harga (IPH), pada pertengahan Maret 2025 tercatat IPH Kabupaten Cirebon sebesar **8,49%** yang mencerminkan adanya kenaikan harga pada komoditas tertentu. Tekanan inflasi cenderung meningkat menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat serta terganggunya pasokan akibat faktor cuaca.

Berdasarkan hasil pemantauan Indeks Perubahan Harga (IPH), Kabupaten Cirebon mengalami fluktuasi harga dengan kecenderungan meningkat pada periode akhir Triwulan I Tahun 2025.

- Komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan harga/inflasi

Komoditas utama yang menjadi penyumbang kenaikan harga di Kabupaten Cirebon pada Triwulan I Tahun 2025 (hasil pemantauan harga di 7 pasar daerah per **14 Maret 2025**) antara lain:

- Cabai merah;
- Bawang merah; dan
- Daging sapi.

Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi sehingga menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Sementara itu, kenaikan harga daging sapi disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

- Kondisi ketersediaan pasokan dan distribusi komoditas strategis

Secara umum, ketersediaan pasokan bahan pangan strategis di Kabupaten Cirebon masih dalam kondisi mencukupi. Monitoring ketersediaan dan stok pangan dilakukan secara langsung di pasar daerah dan RPH, antara lain pada **26 Februari 2025** bersama Wakil Bupati dan Forkopimda. Namun demikian, pada komoditas tertentu seperti daging sapi, terjadi tekanan pada sisi pasokan akibat lonjakan permintaan dalam waktu yang relatif singkat. Kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) juga menjadi salah satu faktor pembatas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada puncak permintaan.

- Risiko yang berpotensi memengaruhi inflasi ke depan

Risiko inflasi ke depan yang teridentifikasi hingga akhir Triwulan I Tahun 2025 antara lain:

Ketidakpastian cuaca yang dapat berdampak pada produksi hortikultura;

- Peningkatan permintaan menjelang HBKN;
- Keterbatasan kapasitas infrastruktur pangan, seperti RPH;
- Potensi kenaikan biaya distribusi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Permasalahan utama pengendalian inflasi di daerah

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Cirebon pada Triwulan I Tahun 2025 meliputi:

1. Curah hujan yang tinggi sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil panen di sentra produksi;
2. Lonjakan permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan tertentu menjelang HBKN Idul Fitri;
3. Keterbatasan daya tampung dan kapasitas pemotongan di RPH;
4. Fluktuasi harga yang cepat pada komoditas hortikultura.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Kebijakan dan langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah selama Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di beberapa desa dan kecamatan, antara lain pelaksanaan bazar murah di Kecamatan Depok dan Desa Cikeduc pada **13 Maret 2025**, dengan menyediakan komoditas strategis seperti beras SPHP, telur ayam, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, cabai merah, dan bawang merah;
2. Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) harga dan stok pangan di pasar tradisional dan toko ritel, termasuk kegiatan monitoring harga dan stok pangan di pasar daerah pada **26 Februari 2025**;
-

3. Pelaksanaan rapat koordinasi dan zoom meeting rutin pengendalian inflasi yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Rapat Koordinasi Penanganan dan Pengendalian Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat pada **12 Maret 2025**;
4. Monitoring ketersediaan pasokan dan produksi pangan di sentra produksi, RPH, dan gudang penyimpanan, termasuk monitoring hasil panen padi, tanaman cabai dan bawang merah, serta ketersediaan sapi dan daging beku di RPH pada **13 Maret 2025**.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi

Pelaksanaan pengendalian inflasi daerah pada Triwulan I Tahun 2025 secara umum berjalan dengan baik dan mampu menahan laju kenaikan harga agar tetap terkendali. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dari sisi regulasi, koordinasi antarperangkat daerah, serta perluasan jangkauan intervensi pasar.

Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi antara lain :

1. Perlunya pembaharuan regulasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
2. Perlunya pembentukan SK Tim Inovasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025;
3. Peningkatan intensitas sidak harga dan stok pangan;
4. Perluasan cakupan wilayah dan jenis komoditas dalam pelaksanaan OPM dan GPM;
5. Penguatan koordinasi lintas stakeholder.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Rekomendasi kebijakan ke depan

Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Cirebon antara lain:

1. Melakukan pembaharuan regulasi TPID Kabupaten Cirebon;
2. Meningkatkan intensitas dan kualitas intervensi pasar melalui OPM dan GPM;
3. Mendorong penguatan produksi pangan lokal, khususnya hortikultura;

Memperkuat sinergi antar-stakeholder dalam pengendalian inflasi daerah.